

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ariman, M. R., & Raghib, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press
- Rusmini, A. (2019). *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. DIY. New Vita Pustaka (Chivita Books Group).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Cv Penerbit Qiara Media.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. PT Nusantara Utama Persada.
- Dwi Haryadi. (2013). *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Lima. Yogyakarta. Lima.
- Suarda, I. G. W. (2022). *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*. PT Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2016). *Tindak pidana pornografi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur. Cv. Penerbit Qiara Media.
- Utama, dkk, A. S. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Sumatera Barat. Cv. Insan Cendekia Mandiri.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung Heros Fc.
- Maggalatung, S. (2014). *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan, dan Ham (Dimensi Keislaman dan KeIndonesiaan)*. Jakarta. Focus Grahamedia.
- Satrio, R. A. (2024). *Statistik Daerah Kota Denpasar 2024 (Vol. 14)*. Bps Kota Denpasar.
- Sulastri, L. (2024). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Jejak Pustaka.
- Wicaksana, D. A. (2015). *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press.

Wijayanto, D. (2014). *Problematisa Hukum dan Peradilan*. Jakarta Pusat. Pusat Data dan Layanan Informasi.

Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung. Heros Fc.

Rahaditya, R. (2024). *Hukum Acara Pidana*. Malang. Cv. Literasi Nusantara Abadi.

Marzuki, P. m. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.

Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo. Zifatama Jawa.

Renggong, R. (2022). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana.

Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru. Hawa dan Ahwa.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Abidin, R. F. W. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia.

Candra dkk, F. (n.d.). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 44.

Fatma Afifah dkk. (2024, september). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2, 143. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.

Fernando dkk, Y. (2023). Tindak Pidana Umum dan Khusus dalam Asas dan Teori Serta Doktrin Hukum Pidana. 1.

Haidar dkk, G. (2020, April). Pornografi Pada Kalangan Remaja. 7.

Khakim, M. (2017). Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum. 354.

Lahif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat memperbaharui atau Merekaayasa Masyarakat. *Law Review*, 3.

Lizi, I. (2018). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. 20.

- sukma dkk, f. (2021, Februari 1). Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Ilegal. *Hukum Responsif*, 12, 31. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>.
- taufik dkk, m. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 39/PID.SUS/2019/PN Met Perkara Prostitusi Pada Media Sosial di Kota Metro. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 3, 38.
- Wuisan, R. (n.d.). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana. ix, 182.
- Ira Yanti, dkk, G. A. C. (2023, Oktober). Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.
- Saputra, dkk, W. (2024). Dilema Hukum: Model Pornografi Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Putusan Mk Nomor 82/PUU-XVIII/2020). *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 7.
- Ilham, F. (2024). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- Istiliani, dkk. (2022). Pengaruh Westernisasi Oleh Gen Z Terhadap Keutuhan Identitas Nasional.
- Philia, dkk, I. T. (2025). Dampak Modernisasi Terhadap Dinamika Kebudayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2, 11.
- Raissa, N. A. (2024, Maret 13). Kompasiana. Dampak Sosial Pariwisata terhadap Transformasi Budaya di Pulau Bali Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Dampak Sosial Pariwisata terhadap Transformasi Budaya di Pulau Bali".
- Rajagukguk, M. (2025). Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48.
- Nikhio, dkk, A. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous knowledge*, 2.
- Bagus, M. (2020). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8.

Setiawan, S. T. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*.

Natasia, D. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'Dekrit'*, 12.

Yusuf DM, dkk, M. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5.

Sahal, C. H. (2025). Peran dan Fungsi jaksa dalam Menghadapi Perkembangan Dinamika Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5.

Badri, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Analisis Hukum*, 2.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Utami, S. P. (2019). Implementasi Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keharusan Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Luwu Utara).

Alkahfi, V. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video Porno Di Akun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan lampiran.

Indonesia. (2002). Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168, dengan lampiran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.